

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WEBSITE E-MUSRENBANG

(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo
Kota Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

CHALVIN ALIF BASKORO

NIM : I71216057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
2020**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Chalvin Alif Baskoro

NIM : I71216057

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang
(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan
Benowo Kota Surabaya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 Juni 2020



Yang Menyatakan

Chalvin Alif Baskoro
NIM : I71216057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Chalvin Alif Baskoro

NIM : I71216057

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang
(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 23 Juli 2020

Pembimbing



Zimamul Khaq, S.Pd, M. Si

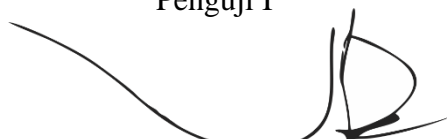
NIP : 198212022015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Chalvin Alif Baskoro dengan judul PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WEBSITE E-MUSRENBANG (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


M. Zimamul Khaq, M.Si
 NIP 198212022015031002

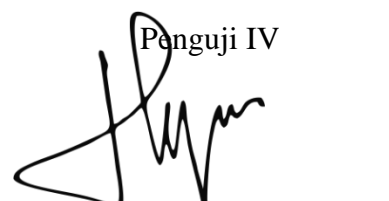
Penguji II


Dr. Khoirul Yahya, M.Si
 NIP 197202062007101003

Penguji III


Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
 NIP 196909071994032001

Penguji IV


M. Ilyas Rolis, M.Si
 NIP 197704182011011007

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan
 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
 NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHALVIN ALIF BASKORO
 NIM : I71216057
 Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
 E-mail address : chalvinalifbaskoro@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

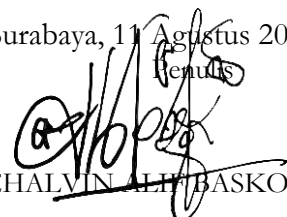
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website
E-Musrenbang
(Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota
Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Penulis

 (CHALVIN ALIF BASKORO)

ABSTRAKSI

Chalvin Alif Baskoro, 2020, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang (Studi Kasus Di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, e-Musrenbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya, (2) mengetahui dan memahami bagaimana dampak dengan diberlakukannya e-musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tangga Partisipasi yang dikenal dengan *A Ladder of Participation* yang digagas oleh Sherry R Arnstein.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari berada pada tangga *delegated of power* atau pendelegasian kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan adanya ruang khusus bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, melainkan sebagai mitra pemerintah. Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan yang sedang dihadapi saat ini. Program-program yang ada saat ini merupakan apa yang mereka usulkan pada saat tahapan proses perencanaan pembangunan berlangsung.

Keberadaan e-Musrenbang sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kota Surabaya telah membawa dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah usulan program pembangunan. Meski begitu, masih terdapat warga yang belum mengetahui kegunaan e-Musrenbang sebagai salah satu sistem perencanaan pembangunan.

Chalvin Alif Baskoro, 2020, citizen participation in Website based development planning E-Musrenbang (case study in Romokalisari Village of Benowo Sub-district of Surabaya City), thesis Program of political Science faculty of Social and Political Sciences of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya.

The purpose of this research is (1) to know and understand how community participation in the planning of development-based website e-Musrenbang in the village Romokalisari Benowo Sub-district of Surabaya, (2) know and understand how the impact with the enactment of e-musrenbang on community participation in development planning.

The results of this study showed that the citizen participation in Romokalisari was on the ladder delegated of power. It is characterized by a special space for the citizen to participate in the development planning process. Society is not only an object of development from the Government, but rather as a government partner. In the process of development planning, the citizen can convey what is the problem and the needs that are currently facing. Current programs are what they propose during the stage of the development planning process.

The existence of E-Musrenbang as one part of the development planning system of the city of Surabaya has brought an impact on the participation of the citizen, it is characterized by the increasing number of proposed development programs. Nevertheless, there are still residents who do not know the usefulness of e-Musrenbang as one of the development planning system.

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRAC	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	9
1 Partisipasi Masyarakat	9
2 Perencanaan Pembangunan	11
3 E-Musrenbang	12
F. Penelitian Terdahulu	13
BAB II KAJIAN TEORITIK	19
A. Kajian Pustaka	19
1. Partisipasi Masyarakat	19
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat	19
b. Jenis – Jenis Partisipasi Masyarakat	21
c. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat	25
d. Manfaat Partisipasi Masyarakat	27
2. Perencanaan Pembangunan	29
a. Pengertian Perencanaan Pembangunan	29
b. Tujuan Perencanaan Pembangunan	32
c. Prinsip – Prinsip Perencanaan Pembangunan	33
d. Tahapan dalam Perencanaan Pembangunan	34
3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ...	32
B. Kerangka Teori	39
<i>The Ladder of Participation Sherry R. Arnstein</i>	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46

C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian	47
1. Informan Penelitian	47
2. Teknik Penentuan Informan	47
3. Objek Penelitian	49
D. Tahap – Tahap Penelitian	49
1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang akan Diteliti.....	49
2. Penentuan Metodologi Penelitian	50
3. Pengumpulan Data	51
4. Pengelolaan, Analisis dan Intrepretasi Data	52
5. Penyusunan Laporan Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Observasi	53
2. Wawancara	54
3. Dokumentasi	55
F. Teknik Analisis Data	55
1. Reduksi Data	56
2. Penyajian Data	56
3. Verifikasi	57
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	58
1. Meningkatkan Ketekunan	58
2. Triangulasi	58
3. Sistematika Pembahasan	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN	61
A. Setting Lokasi Penelitian	61
B. Profil Organisasi	66
1. Kelurahan Romokalisari	66
2. BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya	67
C. Penyajian Data	68
1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berkas Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo	68
2. Kurang Sadarnya Masyarakat Terhadap Kegunaan Website E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan	80
3. Tata Cara Pelaksanaan E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari	82
4. Dampak Penggunaan E-Musrenbang Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo	92
D. Analisis Data	96
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang di Kelurahan Romokalisari	96
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan	104

³ Statistik Daerah Kota Surabaya Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, hal. 1

[illegible]

Salah satu bentuk pelaksanaan e-government yang terdapat di Kota Surabaya adalah penggunaan E-Musrenbang atau Elektronik Musyawarah Perencanaan – Pembangunan Kota Surabaya yang digagas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya atau Bappeko Surabaya. E-

⁷ Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government

E-Musrenbang adalah sistem-perencanaan pembangunan nasional yang mengacu pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang-mewajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berguna sebagai perencanaan daerah untuk satu (1) tahun kedepan. Dengan menggunakan e-musrenbang usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi dikelola oleh sistem yang dapat diakses oleh masyarakat menggunakan jaringan internet.⁹ E-Musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi terwujudnya good-governance atau tata pemerintahan yang baik. Dalam konsep good-governance transparansi publik merupakan sebuah prioritas tersendiri, sebab dengan adanya transparansi dapat memperkecil peluang kesalahan, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengkritisi program pembangunan yang ada. Transparansi merupakan karakteristik dari penerapan good governance.

⁸ Reny Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, *Efektivitas Sistem Electronic* Musyawarah Rencana Pembangunan (*E-Musrenbang*) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. hal. 5

⁹ Ibid, hal 5

wilayah lain dibidang pemerintahan.¹²

¹² Prima Tama Setyasa, *Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya*. Jurnal Penata Ruang Vol. 14 No. 1 Tahun 2019 hal. 12

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam-perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo?
2. Bagaimana dampak diberlakukannya *e*-musrenbang terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo?

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya pada program studi Ilmu Politik dan juga menjadi bahan bacaan bagi khalayak untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya di bidang sosial dan politik.

Agar pembahasan konsep tidak melebar dalam penelitian ini, maka definisi konseptual mempunyai fungsi untuk mempertegas konsep dan pembatasan fokus penelitian. Definisi konseptual yang akan dijelaskan berdasarkan judul penelitian yakni Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan dan e-musrenbang.

Gene Rowe and Lynn J. Frewer menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat atau *public partisipation* adalah “*Public participation may be defined at a general level as the practice of consulting and involving members of the public in the agenda-setting, decision making, and policy-forming activities of*

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan sebuah karakter atau perasaan individu memandang situasi sekitar yang ada dalam lingkungannya yang kemudian mendorongnya untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan yang diharapkan..¹⁵ Pendapat tersebut lebih menekankan pada nilai psikologis dimana munculnya dorongan dalam diri untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya. Sehingga terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi unsurnya, yakni : (1). Adanya tanggung jawab, (2). Adanya kesediaan untuk memberi sumbangsih demi mencapai tujuan kelompoknya, (3). Kesediaan untuk ikut terlibat dalam kelompoknya..¹⁶

¹⁶ Ibid, hal. 74

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan serta penelitian yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan serta penelitian yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan serta penelitian yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan serta penelitian yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan serta penelitian yang dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

takut bahwa suatu saat posisi para pegawai pemerintahan akan digantikan oleh teknologi canggih sehingga mereka kehilangan pekerjaanya, sumber daya manusia yang rendah terlebih di negara berkembang seperti Indonesia dimana angka melek teknologi masih dirasa rendah terlebih orang – orang yang menjadi *opinio leader* merupakan mereka yang sudah berusia lanjut sehingga sulit untuk mengoperasikan teknologi. Di lain hal adanya usulan yang tidak terealisasi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek dari yang diteliti merupakan forum musyawarah rencana pembangunan berbasis IT di beberapa daerah dengan menggunakan media website untuk sebagai media penampung aspirasi dan usulan dari masyarakatnya. Walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini berupaya untuk memperlihatkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan usulan program diwilayahnya.

KAJIAN TEORITIK

1 Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam kerangka demokrasi, partisipasi merupakan cermin dari nilai penting seperti adanya legitimasi, keadilan serta efektivitas tindakan publik. Dengan adanya partisipasi dapat memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui proses pembangunan. Sebab segala bentuk upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari warganya. Hal tersebut mencerminkan keadilan bagi warganya yakni dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.²²

Kata partisipasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *participation* yang artinya adalah keikutsertaan. Dalam kamus Oxford atau *Oxford Advanced Learner's Dictionary* dijelaskan bahwa *participation means (action of) participating* sedangkan *participate means to take part or become involved*. (Partisipasi berarti mengambil peran atau ikut terlibat. Sedangkan dalam Kamus

²² Enos Paselle, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. Jurnal Paradigma Vol. 2 No. 1 April 2013 : 10-25

Kumorotomo kemudian membagi partisipasi kedalam 4 bentuk yakni :

- *Electoral Participation*, merupakan partisipasi yang mudah dilihat dan bersifat rasional. Aktivitas yang menunjukkan partisipasi bentuk ini adalah dalam pemilu.
- *Group Participation*, yakni warga negara yang tergabung kedalam suatu kelompok tertentu dan menyuarakan aspirasinya.
- *Citizen Government Contacting*, adanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang terjalin erat baik dengan cara bersurat, telepon maupun bertemu secara langsung. Seperti dalam kegiatan Musrenbang, dimana pemerintah melibatkan masyarakatnya dengan mengadakan pertemuan – pertemuan.
- *Citizen Participation*, partisipasi warga negara dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah.

³⁰ Ibid, hal. 58

- Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi,
- Partisipasi dalam memberikan tanggapan,
- Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,
- Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan,
- Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan,
- Partisipasi dalam menilai pembangunan.

- Partisipasi dalam bentuk buah pikiran
- Partisipasi dalam bentuk tenaga
- Partisipasi dalam bentuk harta benda
- Partisipasi dalam bentuk keterampilan
- Partisipasi sosial.

[illegible]

[illegible]

- 1 Kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2 Pembangunan masyarakat yang seimbang membutuhkan penerapan program dengan beberapa tujuan.
- 3 Perubahan sikap dari masyarakat penting untuk dicapai pada tahap awal pelaksanaan pembangunan.
- 4 Adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, perbaikan atau revitalisasi pemerintah lokal dan adanya transisi menuju pelaksanaan administrasi yang lebih efektif.
- 5 Pelatihan kepemimpinan ditingkat lokal.
- 6 Mendorong terjadinya partisipasi pada generasi muda dan perempuan.
- 7 Adanya bantuan pemerintah baik secara intensif maupun extensive pada proyek yang berasal dari warga.⁴⁶

⁴⁶ Mukmin Muhammad. *Perencanaan Pembangunan*. (Makassar CV. Dua Bersaudara, 2017) hal. 9

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan diharapkan mampu untuk membangun rasa kepemilikan yang kuat atas hasil pembangunan yang telah dilakukan. Gaddesian mengemukakan, pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahapan awal penyusunan rencana. Keterlibatan tersebut antara lain (1) pendidikan dengan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam hal pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam rangka pemberian alternatif rencana dan usulan pada pemerintah.⁵⁰

na Purnamasari, *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas I
am Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik
22
d, hal. 22
oemarno, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjarangan Aspirasi Masyarakat Banyumanik*. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas
rang tahun 2005. Hal. 26

⁵⁰ Soemarno, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik*. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005. Hal. 26

Dalam perencanaan pembangunan disuatu wilayah, partisipasi menjanjikan sebuah proses yang bersifat kolaborasi, dimana masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, menciptakan ruang dimana mereka dapat mengekspresikan keinginan mereka.⁵²

⁵¹ Irma Purnamasari, *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Tahun 2008. Hal. 24

⁵² Lawrence, *Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity Building*. (London:VA. Earhscan, 2000) hal. 166

Salah satu forum yang ada untuk merumsukan kebijakan tentang perencanaan pembangunan disebuah wilayah atau daerah adalah Musrenbang, dimana partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam proses pembangunan yang ada di wilayahnya. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam forum tersebut maka masyarakat mampu menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka sendiri sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan. Dengan menumbuhkan kesadaran tentang partisipasi dalam forum musrenbang setidaknya masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai perencana pembangunan.⁵³

pelaksanaan dan hasil pembangunan. Dengan menumbuhkan tentang partisipasi dalam forum musrenbang setidaknya bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga perencana pembangunan.⁵³

Dengan adanya partisipasi yang baik dalam pe musrenbang, maka akan tercapailah suatu pemecahan mas dengan apa yang dikehendaki bersama, adanya mufakat n

ustian Kamahuddin, *Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan*
 rta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1992) hal. 184

- terlibat dalam suatu program atau kegiatan, namun kenyataannya keikutsertaan mereka tanpa dilandasi dengan dorongan psikologis atau mental dan konsekuensi keikutsertaannya. Disini masyarakat hanyalah sebagai program atau kegiatan pemerintah. *as a result of this they are demanding genuine levels of participation to assure that public programs are relevant to their needs and respect their priorities.* (Sebagai hasil dari pengetahuannya menginginkan bahwa program publik relevan dengan mereka butuhkan dan menjawab apa yang menjadi prioritas).
- b. Kelompok kedua adalah tokenisme yang terdiri dari tan

terlibat dalam suatu program atau kegiatan, namun kenyataannya keikutsertaan mereka tanpa dilandasi dengan dorongan psikologis atau mental dan konsekuensi keikutsertaannya. Disini masyarakat hanyalah sebagai program atau kegiatan pemerintah. *as a result of this they are demanding genuine levels of participation to assure that public programs are relevant to their needs and respect their priorities.* (Sebagai hasil dari pengetahuannya menginginkan bahwa program publik relevan dengan mereka butuhkan dan menjawab apa yang menjadi prioritas).

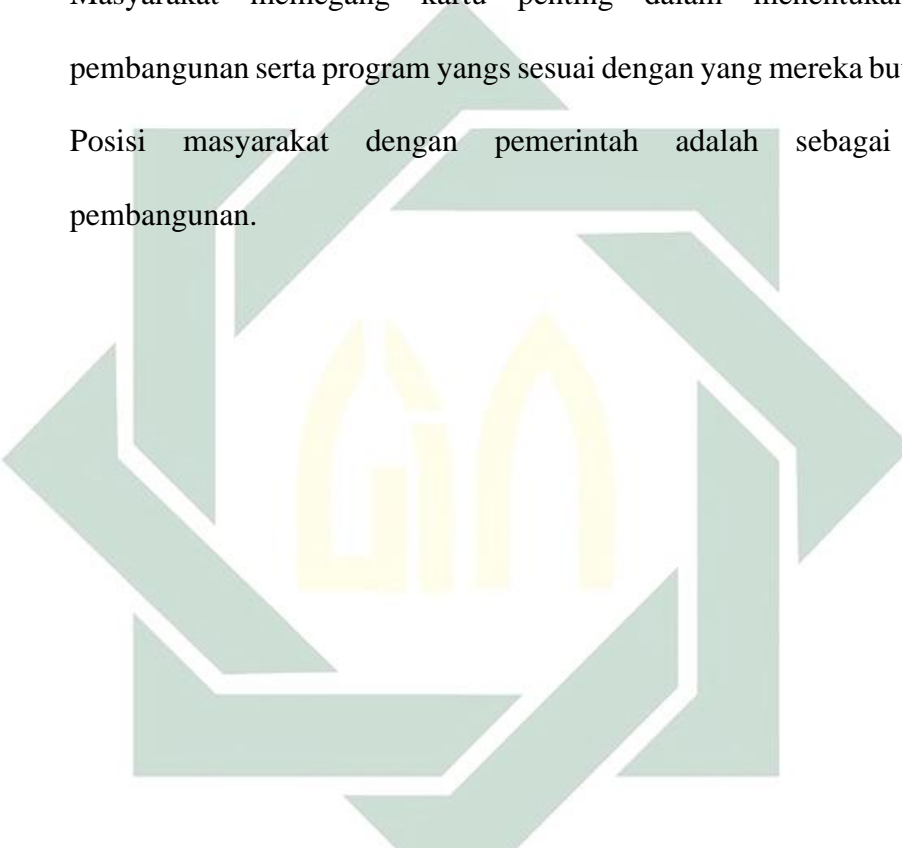
b. Kelompok kedua adalah tokenisme yang terdiri dari tan

Peta Konsep Penelitian

Dari bagan tersebut dijelaskan bahwa penelitian ini diawali dari penerapan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kota Surabaya dengan nama E-Musrenbang. E-Musrenbang merupakan wujud pelaksanaan E-Government dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan E-Government salah satu komponen yang mendukung adalah adanya keterlibatan atau partisipasi dari publik. Peran keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui bagaimana keadaannya, apa permasalahan yang dihadapi dan mereka yang paham potensi apa yang mereka miliki. Dengan menggunakan teori tangga partisipasi Sherry R. Arnstein yang mengklasifikasi partisipasi kedalam delapan anak tangga berdasarkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dan seberapa besar masyarakat diberi ruang untuk dapat menyuarakan aspirasinya, serta kedudukan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, hingga pejabat di Pemerintahan baik Kelurahan maupun Bappeko Kota Surabaya diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari berada pada kedudukan *Delegated of Power* atau pendelegasian kekuasaan, hal tersebut ditandai dengan adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya

Masyarakat memegang kartu penting dalam menentukan pembangunan serta program yang sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Posisi masyarakat dengan pemerintah adalah sebagai mitra dalam pembangunan.



1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Pertimbangan pemilihan lokasi ini dikarenakan kelurahan ini merupakan gerbang masuk kota Surabaya dari arah Kabupaten Gresik atau terletak ujung barat kota Surabaya, dengan lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kota Surabaya dibutuhkan sebuah strategi atau upaya agar masyarakat mau dan ikut serta dalam proses penentuan arah pembangunan bagi daerahnya, sehingga kesenjangan dalam pembangunan tidak terjadi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau dijadwalkan kurang lebih dalam 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Januari 2020 s/d Juni 2020.

Dalam penelitian jenis kualitatif, informan merupakan peran yang penting. Informan merupakan orang atau pihak yang menjadi sumber dan dapat memberikan informasi atau data sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi informan merupakan aktor – aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi masyarakat itu sendiri, Kelurahan yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Romokalisari dan Kepala Trantib Kelurahan Romokalisari, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Menurut peneliti subjek tersebut bisa berkontribusi dalam memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Sebab pembangunan kota merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah kota, melainkan adanya sinergi dengan masyarakat dan pihak – pihak terkait lainnya, dan masyarakatlah yang nantinya akan merasakan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono, teknik *purposing sampling* merupakan teknik pengambilan sampel

[illegible]

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tema partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang. Dimana penerapan e-musrenbang ini sudah lama dilakukan yang dimulai dari tahun 2009, walaupun sudah mengadopsi perkembangan teknologi, tetapi tidak menutup cela bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi dan mengorbankan kepentingan masyarakat bersama. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan ITS Surabaya mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan musrenbang di wilayah Surabaya bagian barat merupakan terendah dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya. Kelurahan Romokalisari berada di Kecamatan Benowo yang masuk dalam kawasan Surabaya Barat.

Setelah melakukan pemilihan topik dan melakukan analisis terkait permasalahan yang diteliti, selanjutnya adalah menentukan metodologi yang hendak digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menjawab dengan tepat dan terandalkan keasliannya. Dalam tahap ini, perlu kiranya untuk menentukan 1) jenis penelitian yang akan

[illegible]

Setelah pengkajian pokok permasalahan, selanjutnya peneliti menentukan metodologi penelitian dengan memilih jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan strategi analisis data miles dan huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi yang menurut peneliti format tersebut relevan dengan fenomena yang ada dilapangan.

Setelah melakukan penyusunan desain dan instrumen penelitian, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini peneliti mewawancarai informan yang menjadi sumber data penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara informan yang terdiri dari, dua pegawai kelurahan, masyarakat dan satu orang dari Bappeko Surabaya yang terlibat dalam pelaksanaan e-musrenbang. Selain itu pengamatan juga dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan yang ada di lapangan.

4. Pengelolaan, Analisis dan Intrepretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau *data processing*. Dimana pengolahan data meliputi kegiatan berupa *edditng data*. *Edditing data* merupakan kegiatan pemeriksaan data yang sudah terkumpul, apakah data sudah terisi sempurna atau belum, sudah lengkap atau belum dan apakah cara pengisiannya sudah benar atau belum, apabila terdapat data yang belum lengkap maka data dapat disisihkan dan diperlukan untuk disempurnakan lagi dengan cara melakukan data ulang ke sumber data yang bersangkutan.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Pada bagian ini, peneliti mengkomunikasikan tentang apa yang telah diteliti, bagaimana cara penelitiannya, dan hasil penelitian yang ditemukan. Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan dalam laporan tentang (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi yang digunakan, dan (3) hasil dari penelitian yang ditemukan.

Proses penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti selama 6 (enam) bulan dengan melakukan pengamatan dilapangan. Dalam laporan penelitian ini peneliti pengkaitkan dan menyatukan masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang dengan metode yang telah dijelaskan dan hasil temuan dilapangan.

2. Wawancara

[illegible]

3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

⁶⁶ Rianto Adi, 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit). Hal. 61

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Website E-Musrenbang.

Kelurahan Romokalisari berada di Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang termasuk dalam 154 Kelurahan yang ada diwilayah Kota Surabaya. Kelurahan Romokalisari termasuk kedalam kawasan Surabaya Barat. Adapun batas – batas Kelurahan Romokalisari terdiri dari :

Tabel 4.1
Tabel Batas Wilayah Kelurahan Romokalisari
Kecamatan Benowo

Sebelah Utara	Selat Madura
Sebelah Timur	Tambak Osowilangun
Sebelah Selatan	Sememi / Kandangan
Sebelah Barat	Kabupaten Gresik

Kelurahan Romokalisari mempunyai luas 7.58 km² dengan ketinggian 2 meter diatas permukaan air laut. Kelurahan ini berjarak 12 km dari Kecamatan Benowo, dan merupakan Kelurahan terjauh yang ada di Kecamatan Benowo.⁷³ Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Selat Madura disebelah utara, dengan Kelurahan Tambak Osowilangun disebelah timur, Kelurahan Sememi / Kandangan disebelah Selatan dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Kelurahan ini merupakan salah

⁷³ Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. hal. 2

No.	Jenis Profesi	Presentase
1.	IRT	0.5 k
2.	PNS	0.03 k
3.	TNI	-
4.	Polri	0.02 k
5.	Nelayan	0.01 k
6.	Karyawan	0.85 k
7.	Dosen	-
8.	Guru	0.04 k
9.	Petani	0.02 k
10.	Wiraswasta	0.15 k
11.	Dokter	-
12.	Lain – lain	0.05 k

Berdasarkan data tentang profesi masyarakat yang ada di Kelurahan Romokalisari bisa dikatakan beraneka ragam. Akan tetapi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai karyawan yakni 0.85 K. Profesi lain yakni

[illegible]

Pembangunan dengan melibatkan masyarakat melambangkan usaha untuk mengembangkan potensi dalam mempersiapkan pembangunan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal berdasarkan amatan musyawarah, yakni kemajuan harapan berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat, adanya dukungan dan peran serta masyarakat dan kemajuan dimana adanya rasa memiliki pada masyarakat terhadap program yang telah disusun.⁸³ Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat terdapat dua cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah (1) harus mampu menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat, (2) melibatkan kemampuan dan motivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketersediaan sumber daya lokal.⁸⁴

Pembangunan akan berhasil apabila peran masyarakat dan pemerintah jelas. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam pemerintahan maka peran pemerintah semakin berkurang, dengan hadirnya teknologi yang dapat diakses secara cepat dan tepat oleh masyarakat terkait hasil pembangunan.⁸⁵

⁸⁵ Ibid hal. 16

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung dengan sistem informasi e-Musrenbang yang dapat diakses oleh masyarakat.⁸⁸

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Romokalisari diawali dengan dilakukannya rembuk warga di tingkat RT guna menjangkau aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. Tujuannya adalah agar usulan yang ada nantinya merupakan usulan yang benar – benar dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.⁸⁹

⁸⁸ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 Pasal 7 ayat (3)

[illegible]

Dalam pelaksanaan musyawarah yang dilakukan ditingkat RT memang tidak semua masyarakat dilibatkan, hanya perwakilan masyarakat yang dilibatkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu K – masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak U yang merupakan mantan Ketua RW dan juga tokoh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

Yang hadir memang perwakilan masyarakat, seperti contoh kalau dari anak muda ya diwakili karang taruna, dari ibu – ibu ya diwakili PKK gitu, suara mereka itulah yang mewakili masyarakat. walaupun ada juga RT yang melibatkan seluruh

⁹¹ Ibu K – Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 pukul 16.10 WIB)

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Ibu R yang merupakan anggota PKK di Kelurahan Romokalisari yang menyatakan bahwa :

Dalam forum rembug warga tersebut warga akan membahas tentang permasalahan – permasalahan yang sedang mereka hadapi saat ini.⁹⁴ Dalam menentukan usulan prioritas digunakanlah skala prioritas untuk mengukur tingkat urgensi dari usulan tersebut. Apabila permasalahan atau kebutuhan tersebut dapat diselesaikan secara swadaya, maka akan diselesaikan sendiri oleh masyarakat, tetapi apabila kebutuhan atau permasalahan tersebut membutuhkan bantuan pemerintah maka akan diusulkan untuk menjadi pertimbangan dalam forum musrenbang yang lebih tinggi.⁹⁵

⁹⁵ Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 pukul 16.45 WIB)

Dalam proses perencanaan pembangunan peran aktif masyarakat dalam menyumbangkan ide – ide, gagasan atau mengajukan usul dan memberikan saran sangat diperlukan, kesempatan itu terbuka lebar bagi masyarakat. Mereka dapat menyampaikan usulan program untuk selanjutnya dibahas bersama dalam forum musyawarah sehingga terjadi dialog antar masyarakat dan lahirlah kata sepakat atau keputusan bersama.⁹⁸ Dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan haruslah dimulai dari akar rumput yakni masyarakat sebagai pihak yang harus menyampaikan usulannya dan menentukan alternatif pemecahan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Termasuk juga didalamnya

⁹⁸ Bapak U – Tokoh Masyarakat Kel. Romokalisari (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 pukul 16.45 WIB)

Kalau pelaksanaan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka mau membantu menyukseskan program, kerja bhakti ataupun program – program pelatihan, bukan hanya yang disupport pemerintah ya, ada juga yang kita kerjasama sama perusahaan disini itu juga mereka antusias ikut, trus pelatihan – pelatihan lainnya juga. Jadi ya gotong royongnya itu ada gitu, dapet. (Bapak U – Tokoh Masyarakat Kelurahan Romokalisari)¹⁰³

Hadirnya e-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan di Kota Surabaya adalah untuk menjawab keinginan dan kebutuhan dari warga Surabaya. Sebab program – program yang ada saat ini merupakan hasil dari usulan mereka pada saat musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan hingga pada tahap Kota Madya dan disahkan menjadi RKPD Pemkot Surabaya.¹⁰⁴ Selain itu dengan adanya e-Musrenbang memberikan transparansi

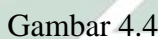
¹⁰⁴ Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020 pukul 10.20 WIB)

Jadi prosesnya gimni mas, awal itu mereka bikin usulan utama dan usulan cadangan. Usulan utama ya usulan priroitas itu, kalau cadangan ya buat jaga – jaga. Jadi di forum Musrenbang Kelurahan itu sudah ada usulan yang gugur, nah sebagai gantinya biar pagunya terpenuhi naiklah usulan cadangan itu, nah itu juga dikembalikan ke masyarakat usulan mana yang sesuai. Nah gitu juga di Kecamatan, trus naik ke OPD jadi kan di OPD ada yang survey tuh nah kalau misal ga sesuai ya gugur, nanti dibahas lagi sama warga apa gantinya. Sampe akhirnya di Musrenbang Kota trus akhirnya disahkan itu.¹²² (Ibu Nina – Staff Bappeko Kota Surabaya)

1. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas – luasnya kesempatan berusaha;

¹²² Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020 pukul 10.20 WIB)

Nantinya usulan yang telah disetujui bersama dapat diakses oleh masyarakat melalui *smartphone* maupun PC mereka di halaman website e-Musrenbang Kota Surabaya. Berikut merupakan tampilan website e-Musrenbang.



Memasuki tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya memberikan tanggungjawab baru kepada Kelurahan sebagai pelaksana dalam pembangunan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ali selaku Kasie. Trantib Kelurahan Romokalisari :

¹²⁴ Ibu Nina Anggreini – Staff Bappeko Surabaya (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020 pukul 10.20 WIB)

4. Dampak Penggunaan E-Musrenbang Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya

Adanya E-Musrenbang telah membawa dampak terhadap perencanaan pembangunan, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak U yang menyatakan bahwa :

¹²⁸ Prima Tama Setyasa, *Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya*. Jurnal Penata Ruang Vol. 14 No. 1 Tahun 2019 hal. 13

Gambar 4.5
Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein

Tangga – tangga tersebut dikelompokkan berdasarkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semakin tinggi tangga maka semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis partisipasi masyarakat dengan menggunakan tangga partisipasi Arnstein yang dijabarkan sebagaimana berikut ini :

Tangga	Derajat	Indikator
Manipulasi	Non Partisipasi	Masyarakat tidak mengetahui terkait dengan proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). Masyarakat ikut terlibat dalam suatu kegiatan karena sebuah keterpaksaan tidak dilandasi karena adanya tanggung jawab.
Terapi		Pada tahap ini komunikasi mulai ada tetapi masih sangat terbatas, inisiatif hanya berasal dari pemerintah. komunikasi masih satu arah. Keikutsertaan masyarakat masih karena sebuah keterpaksaan.
Menyampaikan informasi	Tokenisme	Pemberian informasi terkait perencanaan pembangunan (Musrenbang) hanya untuk memberikan legitimasi terhadap program yang dibuat oleh pemerintah. Keikutsertaan mereka sudah mulai dilakukan secara sukarela.
Konsultasi		Pada tahap ini masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada

¹³⁷ Wahyu Ishardino Satries, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. Jurnal Kyberman No. 2 Vo. 2 September 2011

[digilib.uinsby.ac.id](#)

proses pengidentifikasian permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan usulan dalam forum rembuk untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Ketua RT dan Ketua RW. Dengan begitu, usulan – usulan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan yang ada dapat tepat sasaran.

Apabila dalam pelaksanaan musyawarah pada level selanjutnya ditemui usulan yang tidak sesuai ketentuan, maka usulan tersebut akan gugur otomatis dan akan digantikan dengan usulan cadangan yang telah disiapkan sebelumnya dalam mengubah usulan yang telah gugur dengan usulan cadangan masih dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat, sehingga masyarakat punya andil besar dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat masih berlanjut hingga Musrenbang tingkat Kota.

Pada tingkatan pendelegasian kekuasaan ini, inisiasi sudah dimulai dari masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian hingga pada tahap evaluasi dan penikmatan hasil pembangunan. Walaupun memang dalam proses perencanaan tidak semua warga terlibat hanya sebagian perwakilan saja yang terlibat, namun dari perwakilan tersebut suara masyarakat akan disampaikan. Dalam hal pelaksanaan dan penikmatan hasil pembangunan merupakan kewajiban dan hak setiap individu. Selain pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan program yang telah disepakati, pemerintah menyerahkan pelaksanaannya pada masyarakat. Seperti contoh program permukiman yang merupakan program

Selain itu, dengan adanya peraturan tentang Dana Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Pusat guna mendukung pembangunan yang ada di Kelurahan serta dilimpahkannya pelaksanaan lelang proyek pembangunan kepada Kelurahan sehingga dapat menjadikan Kelurahan sebagai pusat pembangunan, dimana Kelurahan merupakan unit pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan memudahkan masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait pembangunan di wilayahnya. Adapun syarat pelaksanaan lelang adalah apabila terdapat program pembangunan yang menghabiskan anggaran Rp 200.000.000 atau lebih, biasanya adalah untuk pembangunan fisik berupa perbaikan jalan, pemavingan maupun pembuatan saluran air.

[illegible]

terhadap keberhasilan program pembangunan. Pada tangga *delegated of power* masuk kedalam kelompok *citizen power* dimana pada kelompok ini terdapat keterlibatan dari masyarakat sipil sebagai salah satu bagian penting dalam menggerakan masyarakat. Adanya pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal pembangunan, baik berupa fisik maupun pembangunan manusianya. Sedangkan masyarakat berhak atas kehidupan yang layak dan menikmati hasil pembangunan yang ada. Selain hak dan kewajiban, adanya pembagian wewenang dimana masyarakat diberi wewenang guna membuat keputusan terkait sebuah perencanaan dan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang terbebas dari tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Sehingga masyarakat mempunyai kendali penuh atas keputusan yang dibuat bersama dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Romokalisari dapat dikatakan hampir maksimal apabila masyarakat ikut serta dalam mengontrol usulan mereka. Adanya E-Musrenbang merupakan salah satu bentuk pemberian transparansi kepada masyarakat. Walaupun begitu, transparansi yang diberikan hanya sebatas usulan kegiatan, tidak dicantumkan kolom anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan.

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan tangga partisipasi menempatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Romokalisari berada pada level delegated of power berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh masyarakat dan pemerintahan yang diwakilkan oleh Kelurahan dan Bappeko Kota Surabaya. Hal tersebut ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, adanya peran yang penting bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.
2. Adanya e-Musrenbang telah membawa dampak terhadap meningkatnya program pembangunan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan melalui forum musrenbang yang dapat diakses melalui website e-Musrenbang.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis website e-musrenbang adalah sebagai berikut :

1. Menggiatkan sosialisasi dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui tentang kegunaan dan fungsi e-musrenbang terutama kepada masyarakat awam guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan

A. M. Dirga Firgiawan, Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan). Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018.

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2014.

Akadun, Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Mimbar Vol. XXXVII No. 2 Desember 2011

Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Arnstein, Sherry R., A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35 : 4,

Azhar, Fikri, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3 No. 2 tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Statistik Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.

Conyers, Diana, Perencanaan Social di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Gadjah Mada University Pers: Yogyakarta, 1994.

Creswell, Jhon W., 1998. Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions. London : SAGE Publications.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dwh.dispendukcapil.surabaya.go.id

Effendi, Usman, Pengembangan e-Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Ogan Komering Ulu) Jurnal Nasional Informatika 2013 UPN Veteran Yogyakarta 18 Mei 2013 ISSN : 1979-2328

Faisal, Sanapiah, Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Hamijoyo, Partisipasi dalam Pembangunan. Jakarta: Depdikbud RI, 2007.

Hasibuan, Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.

Henri, Ezi, Ninuk Purnaningsih, Amiruddin Saleh, Analisis Efektivitas Musyawarah Rencana Pembangunan (Effectiveness Analysis of Development Planning Conference) Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol. 12 Juli 2014 No. 2 ISSN 1693-3699.

- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembang E-Government di Indonesia.
- Kadir, Abdul, Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Otonomi Daerah. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau Vol. 1 No. 2 Desember 2005.
- Kamahuddin, Rustian, Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.
- Kecamatan Benowo dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
- Kumorotomo, W. Erika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992
- Lawrence, Municipalities and Community Participation a Sourcebook for Capacity Building. London: VA. Earhscan, 2000.
- Mikkelsen, Birtha, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Miraza, Bachtiar Hassan, Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau Vol. 1 No. 2 Desember 2005.
- Mubiyarto, Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM, 1984.
- Mustanir, Ahmad, Partisan Abdi, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, Vol 5 No. 2 Tahun 2017
- Ndraha Talizidhuhu, Pembangunan Masyarakat Desa (Jakarta : Rireba Cipta) 1983
- Noveriyanto, Baharuddin, Laila Chairun Nisa, Achmad Sofian Bahtiar, E-Goverment Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya, Studi Kematangan E-Goverment Sebagai Layanan Komunikasi G2G, G2C and G2B. Jurnal Profetik Komunikasi vol. 11/no. 01/April 2018.
- Paselle, Enos, Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma Vol. 2 No. 1 April 2013.
- Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.
- Purnamasari, Irma, Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik tahun 2008.
- Rahmawati, Nur, Rudi Saprudin & Arie Surya Gutama, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share Social Work Journal*, Vol. 5 No. 1.
- Reny Dwi Karuniawati, Eva Hany Fanida, Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Riyadi dan Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rowe, Gene and Lynn J. Frewer, Evaluating Public-Participation Exercises: A Research Agenda Science, Technology and Human Values, Vol. 29 No. 4.
- Rukminto, Adi Isbandi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi. Komunitas, Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI, 2001.
- Satries, Wahyu Ishadino, Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan*, Vol. 2 No. 2 September 2011
- Setyasa, Prima Tama, Penilaian Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya. *Jurnal Penata Ruang* Vol. 14 No. 1 Tahun 2019.
- Soemarno, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik. Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Tjokrowinoto, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Cipnuy, 1993.
- Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wasistiono, Sadu, Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Yunas, Novy Setia, Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 April 2017.